



KONFERENSI TINGKAT MENTERI WTO KE-13 DI ABU DHABI

Menteri Negara Perdagangan Luar Negeri Uni Emirat Arab Thani bin Ahmed Al Zeyoudi berbicara pada pembukaan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (MC13) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin (26/2). Acara yang berlangsung hingga Kamis (29/2) itu dihadiri para menteri ekonomi, perdagangan, dan pembangunan dari berbagai negara, serta perwakilan dari organisasi ekonomi dan perdagangan global.

Pemogokan Dokter, Perawat Korsel akan Dilibatkan dalam Prosedur Medis

Lebih dari dua pertiga dokter yang menetap dan magang di negara Korsel telah meninggalkan jabatan mereka, sehingga mengganggu layanan di rumah sakit-rumah sakit besar.

SEOUL(IM)- Perawat Korea Selatan (Korsel) telah diberikan perlindungan hukum untuk melakukan beberapa prosedur medis yang biasanya dilakukan oleh dokter. Hal ini ketika pihak berwenang berupaya meringankan beban staf rumah sakit yang disebabkan oleh pemogokan dokter muda dan residen.

Menteri Kesehatan Cho Kyoo-hong pada Selasa (27/2) mengatakan pemerintah sedang mengaktifkan program yang "secara hukum melindungi perawat yang melakukan prosedur di institusi medis" dan cakupan pekerjaan yang dapat mereka lakukan akan ditentukan oleh rumah sakit.

Perawat mengeluhkan risiko hukum dan beban kerja yang lebih berat yang mereka hadapi setelah para dokter residen mengundurkan diri minggu lalu.

Mereka memprotes rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan sekolah kedokteran untuk mengatasi kekurangan dokter. Lebih dari dua pertiga dokter yang menetap dan magang di negara tersebut telah meninggalkan jabatan mereka, sehingga mengganggu layanan di rumah sakit-rumah sakit besar. Ruang gawat darurat telah menolak pasien dan operasi serta prosedur lainnya dibatalkan atau ditunda.

Pemerintah telah mengundang para dokter yang mogok untuk berdialog namun kedua belah pihak belum bertemu. Para dokter senior dan praktisi swasta belum ikut serta dalam aksi mogok tersebut, namun mereka telah mengadakan demonstrasi dan mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut.

Cho mengulangi permohonan

kepada lebih dari 9.000 dokter muda yang telah bergabung dalam aksi mogok tersebut untuk kembali bekerja pada 29 Februari sehingga mereka dapat terhindar dari hukuman termasuk penangguhan izin dan kemungkinan penuntutan dan penangkapan.

Para dokter muda yang bergabung dalam protes mengatakan pemerintah harus memperhatikan gaji dan kondisi kerja terlebih dahulu sebelum mencoba menambah jumlah dokter.

Dalam paket rencana kebijakan untuk meningkatkan layanan medis, pemerintah mengatakan akan meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran baru sebanyak 2.000 per tahun dan memperluas perlindungan hukum terhadap tuntutan malpraktik dan penuntutan.

Pemerintah juga berencana memberikan insentif bagi para dokter untuk melakukan praktik di bidang-bidang penting seperti pediatri dan bedah umum, dan di wilayah regional yang kekurangan dokter lebih parah.

Cho mengatakan pemerintah mempercepat upaya untuk membuat undang-undang perlindungan hukum bagi dokter "yang tidak ditemukan di neg-

ara lain" yang akan memungkinkan pasien dengan cepat mendapatkan kompensasi atas cedera yang diderita selama prosedur medis dan dokter dapat fokus pada pekerjaannya.

Sementara itu, Pemerintah Korsel saat ini mewanti-wanti hukuman yang akan diberikan kepada ribuan dokter Korsel mogok kerja serta turun ke jalan memprotes kebijakan menambah penerimaan mahasiswa kedokteran.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Korsel Lee Sang Min, berbicara dalam pertemuan manajemen krisis, mengatakan bawa pemerintah mengajukan "permohonan terakhir" pada Senin (26/2) waktu setempat agar para dokter kembali bekerja pada minggu ini juga.

"Jika Anda kembali ke rumah sakit paling lambat 29 Februari, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di masa lalu," cetusnya.

Lee menyatakan bahwa tindakan kolektif para dokter yang berkepanjangan ini menimbulkan "ancaman terhadap kehidupan dan kesehatan para pasien". "Rumah sakit adalah tempat di mana impian Anda untuk merawat pasien yang

sakit terwujud setiap harinya," ujarnya kepada para dokter yang mogok kerja.

"Saya harap Anda akan kembali ke tempat kerja dan terlibat dalam dialog untuk lingkungan media yang lebih baik," imbau Lee.

Rumah sakit di seluruh wilayah Korsel berjuang dengan kekurangan tenaga dokter dalam sepekan terakhir. Laporan media lokal menyebut semakin banyak dokter, termasuk lulusan sekolah kedokteran baru, yang bergabung dalam aksi protes tersebut.

Pemerintah Seoul mengatakan Korsel memiliki rasio dokter-dan-penduduk terendah di antara negara-negara maju lainnya. Pemerintah berusaha keras untuk menerima 2.000 mahasiswa kedokteran tambahan setiap tahunnya, mulai tahun depan.

Para dokter di Korsel menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah, dengan alasan bahwa langkah semacam itu akan merugikan kualitas layanan. Namun para pendukung rencana pemerintah menyebut para dokter sebenarnya khawatir jika reformasi medis bisa mengikis gaji dan status sosial mereka. ● tom

Ratusan Pecandu Narkoba Kabur dari Pusat Rehab di Vietnam

VIETNAM(IM)- Otoritas di Vietnam sedang memburu ratusan pecandu narkoba yang melarikan diri dari sebuah pusat rehabilitasi milik negara yang penuh sesak.

Di Vietnam, terdapat lebih dari 30.000 pecandu narkoba yang menjalani perawatan wajib di fasilitas-fasilitas pemerintah. Beberapa di antaranya diwajibkan oleh undang-undang untuk menghabiskan waktu hingga dua tahun di dalam fasilitas tersebut.

Sebagian besar dari mereka menjalani perawatan tersebut di pusat-pusat rehabilitasi yang kelebihan beban, dan di masa lalu pernah ditempatkan di dalam sel isolasi jika mereka melanggar peraturan.

Menyusul "perselisihan internal" pada Sabtu malam lalu, 191 pecandu melarikan diri dari pusat rehabilitasi di kota Soc Trang, Vietnam selatan. Demikian dilaporkan surat kabar Cong An Nhan Dan, yang merupakan corong resmi polisi, seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (26/2).

Pada Senin (26/2) malam waktu setempat, sebanyak 94 orang telah ditemukan dan dibawa kembali. Polisi dan keluarga kini sedang mencari ratusan orang lainnya yang masih buron, lapor surat kabar itu.

Para pecandu narkoba

tersebut dilaporkan mendo-brak pintu asrama mereka dan melarikan diri melalui pintu masuk utama dan melompati pagar besi gedung.

Beberapa pecandu melarikan diri melalui lubang yang mereka buat di salah satu dinding fasilitas tersebut.

Dilaporkan bahwa beberapa penjaga keamanan terluka setelah diserang oleh para pecandu narkoba tersebut.

Menurut media pemerintah yang mengutip pejabat-pejabat setempat, infrastruktur fasilitas tersebut buruk. Tempat itu juga penuh sesak, dengan hanya 60 penjara yang bertanggung jawab atas lebih dari 460 pecandu narkoba, kebanyakan laki-laki.

Meskipun Vietnam sedang bereksperimen dengan lebih banyak pilihan pengobatan berbasis komunitas sebagai tanggapan atas kritik terhadap pusat rehabilitasinya, namun, metode ini tetap menjadi bentuk pemulihan yang paling banyak digunakan.

Pusat-pusat rehabilitasi tersebut didukung secara luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai pilihan pengobatan yang layak, meskipun para spesialis kecanduan narkoba mengatakan bahwa pusat-pusat tersebut tidak berhasil dan tingkat kekambuhannya tinggi. ● ans

Politisi Jerman Digugat Atas Keterlibatan dalam Genosida di Gaza

BERLIN(IM)-Pekan lalu pengacara-pengacara Jerman menggugat sejumlah pejabat tinggi termasuk Kanselir Olaf Scholz yang "membantu dan terlibat genosida" di Jalur Gaza. Kasus ini diajukan atas nama warga Jerman-Palestina yang memiliki keluarga di Jalur Gaza. Pemerintah Jerman diduga terlibat dalam genosida karena tetap mendukung Israel meski jumlah korban jiwa dalam pemboman Israel di Gaza sangat tinggi. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan hampir 30 ribu rakyat Palestina tewas dalam serangan Israel sejak operasi militer dimulai 7 Oktober 2023.

"Kami yang hidup harus mengenang yang mati di Gaza, menceritakan kisah dan perjuangan mereka untuk keadilan," kata peneliti imigran dan salah satu warga Jerman-Palestina yang terlibat dalam kasus ini, Nora Ragab dalam pernyataan yang dikutip Aljazeera, Selasa (27/2).

Motif Ragab dalam kasus ini bersifat politis dan personal. "Bibi dan paman saya di atas 70, seperti kebanyakan orang lanjut usia di Gaza utara, mereka memutuskan untuk bertahan setelah perintah evakuasi dikeluarkan," katanya.

Ketika bulldozer Israel tiba pada suatu hari bulan November lalu untuk menghancurkan rumah terangganya. Paman Ragab keluar meminta para tentara Israel tidak menghancurkan rumah itu karena warga sipil yang damai tinggal di sana.

"Para tentara melihat semuanya, mereka memberitahu kami, paman saya keluar dengan tangan di angkat tapi tentara tetap memabkannya, ketika bibi saya mencoba menyeretnya masuk ke dalam rumah mereka juga menembaknya," kata Ragab.

Sepupu-sepupu Ragab pulang saat gencatan senjata pada 24 November untuk memeriksa keadaan orang tua mereka. Tapi mereka menemukan paman dan bibi Ragab sudah meninggal di halaman rumah. Pasangan itu berpelukan. Sepupu-sepupunya menghingtung 60 luka tembakan. "Ini tanggung jawab saya untuk memastikan orang-orang di Jerman tidak mengalihkan pandangan," kata Ragab.

Kasus hukum ini didukung sejumlah lembaga swadaya masyarakat termasuk European Legal Support Center, Palestine Institute for Public Diplomacy dan Law for Palestine yang berbasis di Inggris. Para pengacara mengajukan gugatan terhadap pejabat yang didukung di Dewan Keamanan Federal setelah putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada bulan Januari lalu. ICJ mengatakan "terdapat kemungkinan" aksi Israel di Gaza termasuk genosida.

Dewan Keamanan Federal Jerman mengarahkan kebijakan keamanan nasional dan memberi wewenang ekspor senjata. Selain Scholz, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, Menteri Perencanaan Robert Habeck, Menteri Keuangan Christian Lindner dan pejabat lain juga gugat.

Bagi Ragab tindakan menggugat politisi Jerman ini penting. "Tentu tidak akan mengembalikannya, tapi kami harus melakukan segalanya untuk mencoba dan menghentikan kekerasan ini," kata Ragab.

Pengacara yang mengajukan kasus ini kejaksaan, Nadja Samour menjelaskan, gugatan ini tergantung pada tiga poin utama. Pertama pernyataan pejabat pemerintah Jerman pada Israel. Kedua penghentian bantuan dana untuk badan bantuan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) sebagai penyedia bantuan utama di Gaza, dan ketiga keterlibatan Jerman dalam mengeksport senjata ke Israel.

Ekspor Jerman ke Israel naik dari 32 juta euro pada tahun 2022 menjadi 303 juta euro tahun lalu. Sebagian besar ekspor tahun lalu disetujui pemerintah Jerman setelah serangan mendadak Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Politisi Jerman mempertimbangkan mengirim lebih banyak peluru tank ke Israel.

Samour mengatakan bila jaksa federal menilai kasus ini memiliki dasar hukum mereka akan mulai menyelidiki gugatan ini. Bila tidak mereka harus menjelaskannya. Sejak putusan ICJ, kasus-kasus serupa juga diluncurkan di negara-negara lain. Satu gugatan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak berhasil. Kasus lain di Belanda berhasil dan menahak ekspor suku cadang pesawat F-35 ke Israel. Dua kasus itu dibanding.

Menurut pakar hukum setempat kasus di Jerman kemungkinan tidak akan berhasil. "Saya pikir rute hukum ini tidak akan berhasil, hukum seputar topik ini terlalu rumit," kata profesor hukum internasional University of Bonn, Stefan Talmon. Talmon menjelaskan, putusan ICJ hanya sementara, sehingga ambang batas pembuktiannya tidak terlalu tinggi. "Sehingga menetapkan (politisi Jerman) bertanggung jawab membantu dan terlibat dalam aksi genosida di wilayah Palestina baginya sangat amat sulit," tambahnya.

Talmon mencatat di masa ada gugatan-gugatan serupa yang berhasil di Jerman. Tapi individu yang terlibat membantu secara langsung. Profesor hukum pidana internasional University of Göttingen, Kai Ambos sepakat dengan pendapat tersebut. "Kami membutuhkan keadilan utama untuk memastikan tanggung jawab sekunder," kata Ambos dalam jawabannya melalui email. Ia mengatakan meskipun tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan, kecil kemungkinan jaksa penuntut federal akan memulai penyelidikan formal. ● tom

Kolombia dan ELN Lanjutkan Perundingan Damai yang Sempat Terhenti

KOLOMBIA(IM)- Pemerintah Kolombia dan kelompok gerilyawan ELN mengatakan pada Senin bahwa mereka akan melanjutkan perundingan perdamaian yang sempat ditunda oleh pemberontak pekan lalu.

Dalam pernyataan bersama di Havana, para pihak mengatakan mereka akan "melanjutkan kegiatan yang ditetapkan" dalam perjanjian sebelumnya sambil mempersiapkan putaran perundingan berikutnya di Venezuela pada April.

Pekan lalu, ELN menyatakan proses tersebut "dibekukan" hingga pemberitahuan lebih lanjut, sehingga mendorong pemerintah untuk menyalahkan para gerilyawan karena telah memperpanjang konflik bersenjata yang telah berlangsung puluhan tahun di negara tersebut.

ELN mengatakan proses tersebut telah dimasukkan ke dalam "krisis" karena pejabat departemen Kolombia mengumumkan pembicaraan terpisah dengan para pejuang di sana bahkan ketika upaya nasional untuk mencapai perdamaian sedang dilakukan.

Sejak terpilih pada 2022 sebagai presiden sayap kiri pertama Kolombia, Gustavo Petro telah berupaya mengakhiri enam dekade pertempuran yang telah melibatkan pasukan keamanan, gerilyawan, paramiliter sayap kanan, dan geng narkoba di negara tersebut.

Pembicaraan dengan ELN, atau Tentara Pembebasan Nasional, dilanjutkan pada November tahun itu. Mereka telah diskors pendahulu Petro, Ivan Duque tahun 2019 setelah serangan bom mobil di akademi kepolisian di Bogota yang menyebabkan 22 orang tewas.

Kelompok Marxis telah mengambil bagian dalam negosiasi yang gagal dengan lima pemerintahan terakhir di Kolombia.

Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia, atau FARC, yang jauh lebih besar, meletakkan senjata berdasarkan perjanjian perdamaian bersejarah tahun 2016, meskipun beberapa pejuang pemberontak menolak perjanjian tersebut dan tetap aktif.

Pembicaraan dengan ELN sebagai bagian dari upaya Petro untuk mencapai "perdamaian total" telah menghadapi banyak kemunduran. Kelompok tersebut, yang terkait dengan perdagangan narkoba, dituduh oleh para pengamat hak asasi manusia memanfaatkan gencatan senjata untuk memperluas pengaruhnya, merebut lebih banyak wilayah dan merekrut anggota baru.

Didirikan pada 1964, ELN memiliki sekitar 5.800 pejuang, yang aktif terutama di pantai Pasifik Kolombia dan di sepanjang perbatasan dengan Venezuela di timur laut. ● tom

Korea Utara dengan Kuba Pecah Karena Bangun Diplomatik dengan Korea Selatan

PYONGYANG(IM)- Korea Utara dilaporkan mengalami perpecahan dengan sekutu dekatnya, Kuba yang bangun hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Kuba dilaporkan telah membangun hubungan diplomatik dengan Korea Selatan pada 14 Februari lalu.

Padahal negara yang pernah dipimpin Fidel Castro itu merupakan sekutu lama Korea Utara sejak Perang Dingin. Memburuknya hubungan Korea Utara dan Kuba membuat media rezim Kim Jong-un telah meminimalisir liputan tentang Kuba.

Dikutip dari Radio Free Asia, Senin (26/2), media pemerintah Korea Utara Rodong Sinmun, sudah tak melaporkan pemberitaan mengenai Kuba sejak 15 Februari.

Pada berita terakhir, media

tersebut melaporkan mengenai Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez yang mengutuk serangan Israel ke Palestina.

Kantor Berita Resmi Korea Utara, KCNA, juga tak memberitakan mengenai Kuba selama lebih dari sepekan. Kuba bahkan tak disebutkan dalam laporan KCNA pada 23 dan 24 Februari mengenai perayaan di misi diplomatik dan perwakilan PBB di 26 negara, dan serangkaian kunjungan ucapan selamat oleh para pejabat untuk memperingati ulang tahun ke-82, eks pemimpin Kim Jong-il.

Biasanya media Korea Utara menyertakan Kuba saat melaporkan acara nasional seperti ulang tahun mantan pemimpin.

Sementara itu pada 15 Februari, Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan

bahwa dibangunnya hubungan diplomatik dengan Kuba akan menjadi pukulan politik dan psikologi bagi Pyongyang.

Korea Selatan sendiri tak memiliki hubungan diplomatik dengan Kuba selama 65 tahun. Sementara itu Kuba terus memiliki hubungan dekat dengan Korea Utara, yang sudah terbentuk sejak 1960. Apalagi, mereka berbagi ideologi sosialis yang sama, dan juga memiliki sikap bermusuhan dengan AS.

Kuba juga memiliki kedutaan besar di Pyongyang.

Kim Jong-un sendiri sempat menyebut Fidel Castro sebagai kawan seperjuangan.

Korea Utara bahkan memberlakukan hari berkebangun resmi pada 2016, ketika Castro meninggal di usia 90 tahun. ● ans



PAMERAN PERTANIAN INTERNASIONAL KE-60 DI PARIS

Masyarakat mengunjungi Pameran Pertanian Internasional ke-60 di Paris, Prancis, Senin (26/2). Pameran tersebut akan berlangsung hingga 3 Maret.